

Analisis Etika Administrasi Publik dalam Pelaksanaan Kerja di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

Nofriadi Eka Putra¹, Ismi Rahmadani², Putri Andalusia³, Ridhatul Khairunnisa⁴,
Rahmadhona Fitri Helmi⁵, Yulia Hanoselina⁶

Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Jln. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Kota Padang

e-mail : Nofriadiekaputra000@gmail.com¹, Smaraismirahmadani@gmail.com², ridhatulkhairunnisa@gmail.com³,
pw31005658@gmail.com⁴, Yuliahanoselina@fis.unp.ac.id⁵, rahmadhonafh@fis.unp.ac.id⁶

Abstract : *This research aims to analyze public administration ethics in the implementation of work at the West Sumatra Province Social Service. Public administration ethics is an important aspect that influences the quality of public services and public trust in the government. The method used in this research is a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation and documentation studies. The research results show that there are several challenges in implementing public administration ethics, such as a lack of employee understanding of the code of ethics, low transparency in decision making, and the practice of nepotism. However, there are also efforts made by the Social Service to improve work ethics, such as ethics training for employees and implementing a monitoring system. This research recommends the need to increase ethical awareness among employees and strengthen monitoring mechanisms to create a more ethical and transparent work environment.*

Keywords: *Public administration ethics, Social Services, public services, transparency, code of ethics.*

Abstrak ; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis etika administrasi publik dalam pelaksanaan pekerjaan di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Etika administrasi publik merupakan aspek penting yang memengaruhi kualitas layanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa tantangan dalam penerapan etika administrasi publik, seperti kurangnya pemahaman pegawai terhadap kode etik, rendahnya transparansi dalam pengambilan keputusan, dan praktik nepotisme. Namun, terdapat pula upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial untuk meningkatkan etika kerja, seperti pelatihan etika bagi pegawai dan penerapan sistem pemantauan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kesadaran etika di kalangan pegawai dan penguatan mekanisme pemantauan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih etis dan transparan.

Kata Kunci: Etika administrasi publik, Dinas Sosial, layanan publik, transparansi, kode etik, Sumatera Barat

1. LATAR BELAKANG

Administrasi publik merupakan bagian penting dalam penerapan good governance, khususnya pada lembaga publik yang fokus pada pelayanan sosial. Harbani Pasolong (2010): Administrasi publik adalah kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif. Administrasi publik juga diartikan sebagai proses di mana sumber daya personal publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu lembaga yang mempunyai tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, meliputi penyuluhan, bantuan sosial, dan manajemen kasus sosial.

Dalam konteks ini, praktik administrasi publik memainkan peranan penting dalam menjamin kualitas layanan yang diberikan, tetapi juga dalam hal keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Di Indonesia, banyak permasalahan etika dalam administrasi publik, mulai dari penyalahgunaan kekuasaan hingga kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran. Dinas Sosial, salah satu lembaga yang mengelola langsung bantuan sosial dan kesejahteraan sosial.

Pelaksanaan kerja adalah proses menerapkan rencana atau kebijakan yang telah disusun dengan cermat. Menurut G.R. Terry, pelaksanaan mencakup kegiatan seperti menentukan tujuan, mengelompokkan tugas, dan penugasan orang-orang dengan memperhatikan lingkungan fisik. Pelaksanaan tidak hanya sekadar aktivitas, tetapi juga melibatkan perencanaan yang matang dan tindakan yang terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Pelaksanaan kerja di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat melibatkan serangkaian kegiatan yang terstruktur dan berfokus pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai pelaksanaan kerja di dinas ini:

Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat memiliki beberapa tugas utama, antara lain:

1. Perumusan Kebijakan: Menyusun kebijakan teknis di bidang sosial yang mendukung program kesejahteraan masyarakat.
2. Pemberian Dukungan: Memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bidang sosial.
3. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas: Melaksanakan pembinaan kepada lembaga sosial dan pelaksanaan tugas lain yang ditugaskan oleh pemerintah.

Tujuan Pelaksanaan Kerja

Tujuan dari pelaksanaan kerja Dinas Sosial mencakup:

1. Mengembangkan Kesadaran Masyarakat: Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam menangani permasalahan sosial.
2. Meningkatkan Mutu Pelayanan Sosial: Mengembangkan alternatif intervensi untuk meningkatkan kemampuan pekerja sosial dan masyarakat.
3. Perlindungan Masyarakat: Melindungi masyarakat dari dampak negatif masalah sosial seperti kemiskinan dan kekerasan.

Proses Pelaksanaan Kerja

Pelaksanaan kerja di Dinas Sosial dilakukan melalui beberapa langkah kunci:

1. Penyusunan Rencana Kerja: Setiap tahun, Dinas Sosial menyusun Rencana Kerja (Renja) berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan.

2. Rapat Koordinasi: Secara berkala, Dinas Sosial mengadakan rapat koordinasi untuk meningkatkan kualitas data dan efektivitas program, seperti Rapat Koordinasi Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang melibatkan berbagai pihak terkait.
3. Pelaksanaan Program: Implementasi program-program kesejahteraan sosial seperti rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial dilakukan secara terintegrasi untuk menjangkau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Kegiatan Utama

Beberapa kegiatan utama dalam pelaksanaan kerja Dinas Sosial meliputi:

1. Program Pemberdayaan Masyarakat: Meningkatkan kemampuan kelompok rentan agar dapat berfungsi secara produktif dalam masyarakat.
2. Pelayanan Sosial: Menyediakan layanan bagi anak-anak terlantar, lanjut usia, dan penyandang cacat untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi.
3. Pengelolaan Data Kesejahteraan Sosial: Memastikan data yang akurat dan terkini mengenai kondisi sosial masyarakat untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam program bantuan sosial.

Evaluasi dan Pengawasan

Dinas Sosial juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program untuk memastikan bahwa target-target yang ditetapkan tercapai. Ini termasuk pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan hasil dari setiap program yang dilaksanakan.

2. KAJIAN TEORITIS

Etika dalam Administrasi Publik

Etika dalam administrasi publik memainkan peran yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Etika administratif tidak hanya mengatur perilaku individu yang bekerja dalam lembaga pemerintahan, tetapi juga mengatur interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Menurut Widodo (2001) dalam (Choirulsyah & Azhar, 2024), etika administrasi publik berfungsi sebagai panduan moral untuk memastikan tindakan pejabat publik sesuai dengan prinsip-prinsip yang diakui, seperti kejujuran, integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini memberikan arahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, serta membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan yang melanggar hukum.

Seperti yang dinyatakan oleh Bertens (2001), etika mengacu pada standar moral yang dipegang oleh individu atau kelompok dalam menjalankan tindakan mereka. Di sektor publik, pelanggaran etika seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dapat merusak reputasi lembaga publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Widodo (2001) dalam (Choirulsyah & Azhar, 2024) menekankan bahwa etika dalam administrasi publik tidak hanya menjadi alat untuk mengevaluasi perilaku pejabat publik, tetapi juga sebagai dasar bagi pengambilan keputusan yang baik dan bertanggung jawab.

Good Governance

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik mengacu pada prinsip-prinsip etis yang mendasari proses pemerintahan, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Menurut United Nations Development Programme (UNDP) (1997), good governance mencakup penggunaan otoritas politik dan administratif untuk mengelola sumber daya negara secara efektif dan adil, dengan tujuan menciptakan kesejahteraan dan kepercayaan publik. Konsep ini juga mencakup peran pemerintah dalam menjamin hak-hak asasi manusia, mendorong partisipasi warga negara, dan mengawasi distribusi kekuasaan yang adil dalam masyarakat (Keping, 2018).

Dalam konteks administrasi publik, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip good governance, seperti penyalahgunaan kekuasaan, dapat mengakibatkan ketidakpercayaan publik (public distrust) terhadap lembaga pemerintahan. (Nkyabonaki, 2019) menekankan bahwa menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat mengancam legitimasi lembaga-lembaga pemerintahan dan mempengaruhi efisiensi pelayanan publik. Prinsip-prinsip good governance harus diterapkan secara menyeluruh untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Etika dalam Administrasi Publik

Pelanggaran etika di kalangan pejabat pemerintah sering kali terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, seperti praktik KKN. Hal ini sangat merusak tata kelola pemerintahan dan menghambat upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan (Bisri & Asmoro, 2019). Pelanggaran ini tidak hanya berdampak pada kinerja birokrasi, tetapi juga menurunkan kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat.

Dalam perspektif administrasi publik, pelanggaran etika dapat menghambat efisiensi dan efektivitas birokrasi. Ricocur dalam (Oktari, Mindarti, & Sujarwoto, 2023) menggarisbawahi bahwa pelanggaran etika dalam birokrasi menyebabkan lemahnya integritas pejabat publik, yang berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat

terhadap pemerintah. Solusi untuk mengatasi pelanggaran ini harus mencakup penguatan regulasi dan penerapan sanksi yang tegas bagi para pelanggar.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

- Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu jenis penelitian yang tidak diperoleh dari metode statistik atau jenis statistik lainnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan bentuk studi kasus. Data diperoleh melalui metode penelitian wawancara, observasi dan naratif serupa dengan metode kualitatif sebagai metode penelitian yang memperoleh informasi deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang diamati.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Khatib Suleiman No. 5 Padang, 19 September 2024.

Pembimbing

Pembimbing adalah orang yang bertugas memberikan informasi tentang situasi dan kondisi lingkungan penelitian. Oleh karena itu, ia harus memiliki banyak pengalaman dalam penelitian. Ia “memaksa” dirinya untuk menjadi sukarelawan sebagai anggota tim peneliti, meski kosong. Dalam kelompok dapat memberikan gagasan tentang nilai, sikap, institusi, norma dan praktik yang membentuk konteks penelitian lokal. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel yang didasarkan pada gagasan penelitian tentang sampel yang dianggap paling tepat, efektif, dan berindeks populasi. Informasi terbanyak dalam penelitian ini adalah 1 orang yang merupakan Kepala Dinas Publik dan Kepegawaian, Arens Basri, S.Com.

Sumber Data

1. Data primer

Data primer penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara mendalam terhadap informan yang bekerja sebagai kepala dinas sosial dan pekerjaan sosial pada dinas sosial di provinsi Sumatera Barat.

2. Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini diperoleh dari observasi, laporan atau dokumen pada dinas sosial di provinsi Sumatera Barat.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau strategi untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian, alat pengumpulan data akan menentukan kualitas penelitian. Oleh karena itu, alat dan metode pengumpulan data harus dikembangkan secara hati-hati. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara mendalam. Tujuan wawancara adalah untuk memahami bagaimana penerapan praktik manajemen pada pelayanan sosial di negara bagian Sumatera Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada seseorang yang bekerja sebagai kepala bagian pelayanan umum dan umum pada dinas sosial di provinsi Sumatera Barat.

Alat pengumpul data

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah panduan wawancara mendalam dan alat perekam untuk menangkap suara pembicara agar dapat dilihat dan didengar dengan segera. Selain itu alat yang digunakan adalah kamera untuk memotret informan yang melakukan wawancara dan alat perekam untuk mencatat kata-kata kunci informan.

Validasi data

Untuk menjaga keabsahan data wawancara yang dikumpulkan dalam penelitian ini, analisis data yang dikumpulkan dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi. Segitiga kebenaran, keaslian dan informasi yang diberikan informan meliputi segitiga waktu tanggap. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan gabungan antara triangulasi metode dan triangulasi sumber data. Misalnya data yang diperoleh dari wawancara. Sedangkan triangulasi sumber data menentukan kredibilitas beberapa informan melalui transkrip, catatan resmi, catatan atau transkrip pribadi, dan foto.

Metode analisis data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara.

Tampilan Data

(data display) Analisis data dalam tampilan data artinya tampilan data atau tampilan data. Dalam penelitian ini data akan disajikan dalam bentuk teks, sehingga data berada dalam pola yang relevan dan mudah dipahami.

Penulisan rangkuman (verifikasi)

Cara analisis data dalam verifikasi ini adalah menarik kesimpulan dengan melihat hasil reduksi dan menunjukkan, apakah kesimpulan awal tersebut didukung dengan bukti-bukti pengumpulan data yang terpercaya dan konsisten di lapangan. Keputusan yang diambil sudah tepat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika administrasi publik berfokus pada kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) dan regulasi yang mengatur pelayanan publik, terutama dalam tugas rehabilitasi sosial di panti-panti yang bernaung di bawah Dinas Sosial. Pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Sosial tidak hanya terbatas pada panti sosial milik pemerintah, tetapi juga mencakup panti sosial milik masyarakat atau swasta.

Selain itu, disebutkan pula bahwa Dinas Sosial bertanggung jawab atas beberapa jenis pemerlu pelayanan kesehatan sosial, termasuk penyandang disabilitas, lansia terlantar, anak terlantar, dan wanita tunasusila. Pelayanan ini harus dijalankan sesuai dengan regulasi, yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Raya.

Penerapan etika administrasi publik di Dinas Sosial, terutama dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti penyandang disabilitas, lansia terlantar, anak-anak terlantar, dan wanita tunasusila. Penerapan etika ini dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan regulasi, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang kewenangan pemerintah. Artikel ini juga menguraikan bahwa Dinas Sosial memberikan dua jenis pelayanan utama, yaitu pelayanan terhadap orang terlantar (kalantar) dan distribusi logistik bencana alam. Pelayanan terhadap orang terlantar melibatkan penanganan dan pemulangan mereka ke daerah asalnya, sementara distribusi logistik difokuskan pada bantuan saat terjadi bencana.

Selain itu, artikel ini membahas pentingnya SOP dalam menjaga agar setiap pegawai menjalankan tugasnya sesuai aturan hukum dan standar yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja pegawai dilakukan secara berkala untuk memastikan pelayanan yang diberikan memenuhi harapan masyarakat. Pelatihan dan peningkatan kapasitas juga diadakan secara rutin untuk memastikan pegawai Dinas Sosial terus memahami aturan terbaru dan bisa memberikan pelayanan yang optimal. Namun, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah perubahan budaya kerja yang lambat, terutama karena banyak pegawai yang masih terbiasa dengan cara kerja lama dan sulit beradaptasi dengan regulasi baru.

Pengawasan dan penegakan disiplin juga merupakan bagian penting dari etika administrasi publik di Dinas Sosial. Pengawasan dilakukan melalui evaluasi rutin terhadap kinerja pegawai, dan kepatuhan terhadap kode etik yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2021. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik juga sangat ditekankan, dengan pegawai dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban yang jelas, baik

dalam hal keuangan maupun dalam pengambilan keputusan pelayanan. Artikel ini secara keseluruhan memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana etika administrasi publik dijalankan di Dinas Sosial, tantangan yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

Bagian ini memuat proses pengumpulan data, rentang waktu dan lokasi penelitian, dan hasil analisis data (yang dapat didukung dengan ilustrasi dalam bentuk tabel atau gambar, **bukan** data mentah, serta **bukan** dalam bentuk *printscreen* hasil analisis), ulasan tentang keterkaitan antara hasil dan konsep dasar, dan atau hasil pengujian hipotesis (jika ada), serta kesesuaian atau pertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya, beserta interpretasinya masing-masing. Bagian ini juga dapat memuat implikasi hasil penelitian, baik secara teoritis maupun terapan. Setiap gambar dan tabel yang digunakan harus diacu dan diberikan penjelasan di dalam teks, serta diberikan penomoran dan sumber acuan. Berikut ini diberikan contoh tata cara penulisan subjudul, sub-subjudul, sub-sub-subjdul, dan seterusnya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Menekankan pentingnya etika administrasi publik dalam menjaga kualitas pelayanan di Dinas Sosial. Etika administrasi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam menjalankan tugas, tetapi juga memastikan pelayanan yang diberikan sesuai dengan regulasi dan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Pelaksanaan etika yang baik sangat bergantung pada kepatuhan pegawai terhadap aturan dan kemauan untuk terus meningkatkan kapasitas melalui pelatihan dan evaluasi.

Menyoroti tantangan besar dalam mengubah budaya kerja yang telah lama terbentuk di lingkungan birokrasi. Tantangan tersebut meliputi upaya untuk mengubah mindset pegawai agar lebih adaptif terhadap perubahan regulasi dan tuntutan pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Penerapan etika administrasi publik yang baik memerlukan komitmen dari seluruh elemen dalam organisasi, pengawasan yang ketat, dan evaluasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, Dinas Sosial dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif, profesional, dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Adapun saran penulismengenai permasalahan etika pejabat pemerintahan dari perspektif administrasipublik yaitu :

1. Untuk memastikan kepatuhan terhadap kode etik, perlu diterapkan sanksi yang tegas terhadap pejabat yang melanggar aturan etika. Penerapan sanksi ini harus dilakukan secara adil, tanpa diskriminasi, serta dilaksanakan dengan transparansi penuh,

sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi publik. Konsistensi dalam penegakan sanksi akan memberikan efek jera dan pada saat yang sama memperkuat akuntabilitas pejabat dalam menjalankan tugas mereka di sektor pemerintahan.

2. Masyarakat harus secara aktif dilibatkan dalam pengawasan terhadap pejabat pemerintahan. Penyediaan platform pengaduan yang mudah diakses oleh publik akan memberi masyarakat ruang untuk berperan dalam menjaga integritas pemerintahan. Dengan adanya partisipasi publik, diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Partisipasi masyarakat akan memperkuat kontrol sosial terhadap kinerja pejabat serta mendorong adanya perubahan positif dalam sistem pemerintahan

DAFTAR REFERENSI

Nomor, U. U. (23). Tahun 2014 Tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah.

Sanadi, P. Y. F., Fatmawada, S., & Djunaedi, D. (2024). ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN BIAK NUMFOR. *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak*, 19(1), 55-71.

Suri, H. M., & Kismartini, K. (2017). Implementasi Kebijakan Peran Serta Lingkungan Pendidikan Tinggi Berwawasan Anti Narkoba Di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(3), 231-248.

Terry, G. R. (2021). *Dasar-Dasar Manajemen Edisi Revisi*. Bumi Aksara.